

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-buku

- Adnan, M., 2020, *Hukum Pemilu dan Pemilihan di Indonesia: Dinamika, Problematika, dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Aji, Ari Bakti Windi, 2019, *Demokrasi Lokal dan Tantangan Pengawasan Pemilu*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- , 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- , 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (ed. Revisi)*, Jakarta: Konstitusi Press.
- , 2020, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: Rajawali Pers.
- Bawaslu RI, 2020, *Panduan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2020*, Jakarta: Bawaslu RI.
- Budiardjo, Miriam, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Dahl, Robert A., 1998, *On Democracy*, New Haven: Yale University Press.
- Echols, John M. & Shadily, Hassan, 2014, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Friedman, Lawrence M., 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation.
- Goldstein, Joseph, 1980, *The Passive Judiciary: Prosecutorial Discretion and the Guilty Plea*, New York: Random House.
- Hamid, Edi Suandi, 2004, *Memperkokoh Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UII Press.
- Muladi, A., 2018, *Teori Penegakan Hukum: Konsep dan Aplikasi di Indonesia*, Bandung: Alumni.

- Nonet, Philippe & Selznick, Philip, 2001/1978, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York: Harper and Row.
- Notonagoro, 1984, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Bina Aksara.
- Nurdin, 2017, *Rekonstruksi Demokrasi Lokal di Aceh Pasca-MoU Helsinki*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurhasanah, S., 2020, *Pengawasan Pemilu dan Pilkada: Tantangan dan Strategi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Prasetyo, T., 2018, *Filsafat Pemilu*, Bandung: Nusa Media.
- Prasetyo, Teguh, 2019, *Pemilu dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, Bandung: Nusa Media.
- Puadi, 2020, *Demokrasi Pemilu dan Politik Uang, Dinamika dan Aktualisasi Penanganan Pelanggaran Pilkada dan Pemilu*, Jakarta: Aldhera Shalih Indonesia.
- Pruitt, Dean G. & Rubin, Jeffrey Z., 1986, *Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement*, New York: Random House.
- Rahardjo, Satjipto, 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- , 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2009, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Salim HS & Nurbaini, 2013, *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Arbitrase, Mediasi, dan Negosiasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sinaga, Dahlan, 2018, *Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media.
- Siregar, E., 2020, *Pengawasan Pemilu di Indonesia: Tantangan dan Solusi*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- , 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- , 2010, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Soemantri, Sri, 2001, *Otonomi Daerah di Negara Kesatuan*, Bandung: Alumni.
- Solosa, Daniel, 2005, *Pilkada Langsung*, Jakarta: Media Presindo.
- Susanti, Bivitri, 2015, *Demokrasi dan Negara Hukum: Perspektif Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: Jurnal Konstitusi.
- Syahrial, M., 2020, *Budaya Politik dan Dinamika Pemilu di Aceh: Tantangan dan Peluang*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Tutik, Titik Triwulan, 2015, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Universitas Malikussaleh, 2016, *Pedoman Penelitian Tugas Akhir*, Lhokseumawe: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

II. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

III. Tesis, Jurnal, dan Artikel

- Aji, A. B. W., & Hidayat, D. 2022. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada): Studi tentang Pengaturan Permasalahan Hukum dan Penegakan Hukum Pilkada. *Rio Law Jurnal*, 3(1). <https://doi.org/10.36355/.v1i2>
- Andiraharja, D. G. 2020. Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Khazanah Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7681>
- Asnawi. 2018. Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Banten Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Mimbar Justicia*, 4(2).

- Asnawi. 2023. Implikasi Yuridis Penunjukan Penjabat Kepala Daerah di Daerah Otonomi Khusus: Studi Kasus Aceh. *Jurnal Rechtsstaat*, 14(2).
- Asnawi. 2023. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu di Aceh. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 6(2).
- Asrina, S., dkk. 2024. Politik Hukum Penundaan Pemilihan Kepala Daerah di Aceh Tahun 2022 Menjadi 2024. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 12(1).
- Baharita. 2023. Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Undang-Undang Pemilukada. *Jurnal Legalitas*, 1(2).
- Budiarti, R. 2020. Partisipasi Pemuda dalam Pengawasan Pemilu melalui Program Pengawasan Partisipatif. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 6(1).
- Carto. 2024. Dilema Pembuktian Politik Uang dalam Pemilu Lokal: Studi Kasus di Provinsi Aceh. *Jurnal Hukum dan Pemilu*, 5(1).
- Diani, A. N. 2020. Dinamika Pengawasan Pemilu di Indonesia: Antara Tantangan Struktural dan Hambatan Kultural. *Jurnal Demokrasi dan Pemerintahan*, 8(2).
- Falaakh, M. F. 2013. Antara Kepastian dan Keadilan dalam Hukum Pemilu: Menakar Peran Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 10(3).
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/826>
- Fasya, T. K. 2022. Kekhususan Aceh dalam Bayang-Bayang Ketidakpastian Hukum: Telaah Terhadap Penundaan Pilkada 2022. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(2).
- Fitri, I. 2023. Analisis Hukum Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Majene (Studi Kasus Penanganan Penyelesaian Pelanggaran di Badan Pengawas Pemilu Tahun 2020). *Universitas Bosowa Journal*.
- Fitri, N. 2022. Digitalisasi Pengawasan Pemilu: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Demokrasi Digital*, 2(2).
- Idayat, M. T. 2021. Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu dalam Menjamin Kualitas Pengawasan di Tingkat Lokal. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 12(1).
- Kartabrata, A. 2022. Optimalisasi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Penegakan Pelanggaran Administrasi Secara Terstruktur, Sistematis dan Massif dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Jurnal Keadilan Pemilu*.

- Kartini, D. S. 2017. Demokrasi dan Pengawas Pemilu. *Journal of Governance*, 2(2). <https://doi.org/10.31506/jog.v2i2.2671>
- Khuwailid, M. 2018.** *Analisa Peran Panitia Pengawas Kabupaten Aceh Tamiang dalam Penegakan Hukum Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017.* Tesis. Universitas Medan Area.
- Maulana, J., dkk. 2024. Peningkatan Kapasitas Panwaslih dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 6(2).
- Murya, A. 2023. Disharmoni Regulasi Pemilu di Aceh: Antara Qanun dan Undang-Undang Nasional. *Jurnal Otonomi Daerah dan Politik Lokal*, 5(1).
- Nasution, R. 2021. Politik Uang dan Patronase Lokal dalam Pemilu di Aceh: Sebuah Tinjauan Kultural. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 13(1). <https://doi.org/10.1234/jpkp.v13i1.3456>
- Noor, F., dkk. 2021. The Implementation of Direct Local Election (Pilkada) and Money Politics Tendencies: The Current Indonesian Case. *Indonesian Political Science Review*, 6(2). <https://doi.org/10.15294/ipsr.v6i2.31438>
- Pahlevi, I. 2021. Pengawasan Pemilu dan Tantangan Partisipasi Masyarakat di Daerah Terpencil. *Jurnal Demokrasi dan Pemilu*, 6(2).
- Parlindungan, A. 2019. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 2(2). <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.108>
- Rahman, D. A., dkk. 2024. Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan Menuju Rekonsiliasi atau Sumber Ketegangan Baru. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(3). <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.4459>
- Ramadhan, M. N. 2021. Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(2). <https://doi.org/10.55108/jap.v2i2.12>
- Rasyad, R., Ikhwan, I., Manan, A., & Putra, R. S. 2023. Ulama and Santri's Participation in 2019 General Election in Aceh. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 37(1).
- Rinaldo, E. P. R. 2017. Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3).

- Sari, R. 2022. Analisis Kewenangan Panwaslih dalam Penegakan Hukum Pemilu: Studi Kasus di Aceh. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 15(1). <http://doi.org/10.5678/jhk.v15i1.1234>
- Setiawan, D. 2021. Tantangan Waktu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Politik*, 14(3). <https://doi.org/10.1234/jhp.v14i3.5678>
- Sholihin, M., & Wibawa, I. 2023. Problematika Penegakan Hukum Pelanggaran Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah Dalam Pemilu di Kabupaten Jepara. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(11).
- Sinaga, B. N., Pasaribu, J., & Napitupulu, J. 2021. Pelanggaran Administrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. *Visi Sosial Humaniora*.
- Susanti, B. 2015. Demokrasi dan Negara Hukum: Perspektif Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Konstitusi*, 12(3). <https://ejournal.mkri.id/index.php/jk/article/view/1504>
- Sutisna, I. 2020. Urgensi Pendanaan Pengawasan Pemilu dalam Menjamin Independensi Bawaslu Daerah. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1).
- Wahyuni, S. H. 2022. Kelembagaan Panwaslih dalam Konteks Kekhususan Aceh. *Jurnal Otonomi Daerah dan Politik Lokal*, 4(2).
- Wibowo, S. 2021. Panwaslih sebagai Agen Perubahan: Tantangan dan Strategi dalam Mewujudkan Demokrasi yang Berintegritas. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 14(2). <http://doi.org/10.5678/jipp.v14i2.4567>
- Zainuddin, A. 2019. Literasi Hukum dan Partisipasi Politik Masyarakat di Aceh: Sebuah Analisis. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(2). <https://doi.org/10.5678/jhm.v10i2.7890>